



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARYANTO
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 205954

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 383.496.000**

1. Tanah Seluas 745 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 61.090.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/42 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 74.886.000
3. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 144.200.000
4. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 45.920.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 57.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 87.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINICAB Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N26L2A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 8.723.900**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 16.648.476**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	495.868.376
III. HUTANG	Rp.	37.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	458.668.376

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.